# BAB II

**TINJUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan Literatur**

Untuk membantu penulis dalam menjelaskan mengenai variabel bebas, variabel terikat, dan keterkaitan antara keduanya, maka penulis menggunakan literatur reviu. Dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, terutama skripsi, benar-benar tidak ada yang bersifat asli dan benar-benar baru yang dihasilkan oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengambil beberapa tulisan dari berbagai sumber mengenai pakta - pakta perjanjian trilateral AUKUS.

Penelitian pertama dari jurnal ISEAS (*Yusof Ishak Institute*) pada tanggal 14 Oktober 2021 oleh William Choong dan Ian Storey yang berjudul ***“Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability”***. Dari penelitian tersebut, menjelaskan bagaimana AUKUS *alliance* ini mengundang berbagai macam reaksi internasional khususnya 6 negara maritim utama Asia Tenggara yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam & Thailand. Kebanyakan negara Asia Tenggara memberikan respon dengan menyatakan keprihatinannya atas terbentuknya aliansi baru AUKUS ini. Malaysia tetap berkomitmen bahwa Asia Tenggara merupakan zona damai, kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) dan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ). Indonesia membuat pernyataan bahwa Australia harus tetap memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya. Sementara Filipina, Singapura & Vietnam menyambut baik pembentukan sistem aliansi AS ini dengan bercermin pada kebijakan tegas China di Laut China Selatan. Terakhir ialah Thailand yang menanggapi AUKUS dengan hati-hati karena ingin menjaga hubungan baik dengan AS dan China.

Penelitian kedua dari jurnal *House of Commons Library* pada tanggal 11 Oktober 2021 oleh Louisa Brooke-Holland, John Curtis, and Claire Mills yang berjudul **“*The AUKUS agreement.”*** Dari penelitian tersebut, menjelaskan bagimana pakta - pakta mengenai kesepakatan antara tiga negara (Inggris, Australia, dan Amerika) yang berkolaborasi dalam kepal selam bertenaga nuklir baru untuk Angkatan Laut Australia dan bekerja sama di bidang - bidang seperti dunia maya dan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membantu mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. China mengungkapkan kekhawatirannya bahwa itu bisa memicu perlombaan senjata atau meningkatkan resiko konflik. Sementara Prancis yang akan kehilangan kontrak multimilar untuk membangun kapal selam baru untuk Australia sebagai akibat dari AUKUS, dan menggambarkan pengumuman itu sebagai “tikaman dari belakang”.

Penelitian Ketiga dari jurnal Dinamika Global pada tanggal 12 September 2021 oleh Mariane Olivia Delanova yang berjudul **“Dampak Pakta Pertahanan *Trilateral* AUKUS Terhadap Kondosi Regional Indo-Pasifik”** Dari penelitian tersebut menjelaskan bagaimana perbedaan kepentingan dan kecenderungan untuk menunjukan pengaruh yang kuat dari masing - masing pihak tanpa keberanian untuk menerima konsekuensi dari skema *power politics* yang sedang berlangsung mendorong kekhawatiran dan ketidakpercayaan negara lain atas komitmen negara-negara yang terlibat dalam aliansi AUKUS. Langkah Australia dalam rangka memperkuat kapabilitasnya dapat dianggap sebagai peringatan untuk China agar mematuhi aturan internasional yang ada. Selama Australia menggunakan kapasitas kapal selam tersebut tanpa adanya intensi untuk melakukan tindakan agresif, maka kekhawatiran yang sekarang ada sudah harus bisa dihilangkan. Melalui refocusing AS, upaya inggris sebagai aktor eksternal berpengaruh untuk lebih terlibat di Indo-Pasifik serta bagaimana upaya Australia untuk membalas hukuman karena ketidaksesuaian kepentingan nasional mereka dan ambisi China.

Penelitian dari jurnal *for Peace and Nuclear Disarmament* pada tanggal 30 September 2021kempat oleh Nobuyasu Abe yang berjudul **“*The NPT at Fifty: Successes and Failures”*** Dari penelitian tersebut menjelaskan bagaimana jika kegagalana NPT tidak diatasi, maka lambat laun akan hilang relevansinya. Pembentukan sistem komperhensif IAEA untuk memantau kegiatan nuklir dari negara - negara yang berjanji untuk tidak memperoleh senjata nuklir di bawah perjanjian.

*Treaty on the Non-proliferasi of nuclear weapons* merupakan perjanjian mengenai pembatasan kepemilikan senjata nuklir, yang mana perjanjian ini cukup diskriminatif bagi negara-negara diluar 5 negara yang boleh mengembangkan nuklir yaitu AS, China, Inggris, Prancis, dan Rusia. Negara lain diluar negara itu tidak bisa mengembangkan senjata nuklir karena dianggap sebagai *non-nuclear weapone state* yang minim pengetahuan di bidang pengoprasian tenaga nuklir.

Karena Australia bukan merupakan negara yang berhak mengembangkan nuklir menurut NPT maka kekhawatiran muncul apabila negara lain akan mengikuti jejak Australia untuk mulai mengembangkan nuklir.

Penelitian kelima dari jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik pada 2 November 2006 oleh Alekius Jemadu yang berjudul **“Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik.”** Dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana kedekatan Australia dengan Amerika yang merupakan *cornerstone* dalam kebijakan keamanan Australia. Hubungan AS dengan Australia merupukan hubungan yang special dimana pada masa pemerintah Perdana Mnenteri John Howard kerjasama untuk menghadapi ancaman teroris di Asia Tenggara dan proliferasi senjata pemusnah massal terus ditingkatkan. (Jemadu, 2006)

AS merupakan bagain pokok dari masa depan Australia, peran AS sangat besar di kawasan Asia Pasifik tanpa adanya keterlibatan AS, Australia merasa lebih sulit untuk mencapai tingkat keamanan dan stabilitas yang diinginkan. Bangkitnya kekuatan China merupakan fenomena yang dominan membuat pemikiran bagi setiap negara yang merasa bahwa China merupakan ancaman turut dirasakan oleh Australia. Maka dari itu, Australia mulai memperkuat pertahanan keamanan nasionalnya dan hubungan aliansi dengan amerika pun turut diperkuat dan keamanan regional dan multilateral pun mulai dibangun. (Wuryanti, 2012)

Tabel 2.1 Literature Review

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Judul | Penulis | Persamaan | Perbedaan |
| 1 | *Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability* | William Choong dan Ian Storey | Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai respon-respon negara Asia tenggara mengenai kerjasama trilateral AUKUS.  | Subjek penelitian yang berbeda yang mana literatur ini hanya membahas respon negara-negara Asia Tenggara secara spesifik.  |
| 2 | *The AUKUS agreement* | Louisa Brooke-Holland, John Curtis, and Claire Mills | Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai dinamika dan fakta AUKUS juga mengenai aktor aktor di dalam kerjasama trilateral AUKUS. | Objek penelitian yang berbeda dari dimana literatur ini membahas mengenai reaksi prancis atas batalnya kerjasama pembuatan kapal selam antara prancis dan Australia sebelumnya, juga mengenai pemberitahuan tiba-tiba atas kerjasama AUKUS. |
| 3 | Dampak Pakta Pertahanan *Trilateral* AUKUS Terhadap Kondosi Regional Indo-Pasifik | Mariane Olivia Delanova | Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh AUKUS.  | Membahas bagaimana sikap Australia dalam pembentukan AUKUS yang bertujuan untuk meredam penguatan pengaruh militer China.  |
| 4 | *The NPT at Fifty: Successes and Failures* | Nobuyasu Abe | Persamaan dalam literatur dan penelitian ini sama-sama melihat bagaimana kegagalan NPT dalam menghentikan poriferasi nuklir negara-negara adidaya. | Perbedaan dalam literatur dan penelitian ini dimana membahas mengenai negara negara yang diperbolehkan mengembangkan nuklir dalam NPT, pelucutan senjata nuklir dan juga control senjata. |
| 5 | Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Politik | Alekius Jemadu | Persamaan dalam penelitian dan literatur ini adalah sama sama membahas mengenai aktor yang ada di dalam kerjasama AUKUS yaitu Australia. dan bagaimana hubungannya dengan Amerika Serikat. | Perbedaan dalam literatur dan peenelitian ini adalah kebijakan apa yang berlaku antara Australia di kawasan Indo-Pasific. |

* 1. **Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Politik Internasional, Model Aksi Reaksi**

Richard Synder, H. W. Bruck dan Burton Sapin mengamati sebuah proses interaksi dalam sistem internasional sebagai suatu konsep aksi dan reaksi antara entitas politik. Hal ini berarti bahwa respon yang diberikan oleh suatu negara akan berlandaskan pada bagaimana aktor/pemangku kebijakan membaca fenomena yang terjadi di sekitarnya dan menghasilkan suatu jawaban atas masalah aksi dan reaksi tadi dan mengarah pada suatu pola interaksi.

Aksi yang dilakukan oleh suatu negara muncul akibat dari adanya upaya untuk memenuhi kepentingan suatu aktor, entah demi membangun, memelihara, atau mengatur interaksi yang terjadi antar aktor. Hal ini dapat tercapai apabila aktor tersebut mempunyai rencana yang baik dan mampu mencapai tujuannya.

Reaksi berbicara mengenai upaya aktor atau negara dalam menanggapi aksi dari aktor lain tadi. Reaksi yang diberikan pun dapat berupa suatu aksi yang tidak menentang tujuan atau kepentingannya. Dalam perkembangannya, reaksi bisa saja bertentangan dengan tujuan dari negara yang memberikan aksi.

Buzan dan Eric Hearing menjelaskan mengenai 2 model yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika persenjataan pada suatu negara yaitu: Model Aksi Reaksi *(Action – Reaction Model)* dan Model Struktur Domestik *(Domestic Structure Model).* Pada model aksi-reaksi peningkatan aksi kekuatan militer pada *Hostile state* akan memicu peningkatan ancaman yang dirasakan oleh negara lain, dan juga memicu reaksi untuk meningkatkan kekuatanya. Menurut Buzan, itu adalah suatu aslasan mengapa suatu negara meningkatkan kekuatan militernya untuk tujuan politik.

Ada 3 variabel untuk mengukur tingkat dinamika persenjataan dalam reaksinya dengan kebangkitan dari negara lain, yaitu: 1. *Magnitude*, yaitu seberapa besar reaksi dating terhadap suatu aksi. 2. *Timing,* yaitu kecepatan dan sekuens dari interaksi. 3*. Awareness*, seberapa jauh suatu kelompok yang terlibat dari dampak inteeraksi dinamika perseenjataan mereka sendiri. (putra, 2011)

###  **2.2.2 Struggle for Power**

Seperti semua politik, politik internasional merupakan perebutan kekuasaan, dimana masyarakat dan negara mendapatkan kemakmuran, keamanan, ataupun kekuasaan itu sendiri. Setiap kali negara atau masyarakat mencoba mewujudkan tujuan melalui polirik internasional pada akhirnya mereka akan berjuang untuk sebuah kekuasaan. Kekuatan politik bukan berarti kekuatan dalam arti pelaksanaan kekerasan fisik. Dengan kekuatan politik yang mengacu pada hubungan timbal balik dan kontrol di antara pemeggang otoritas-otoritas publik

Politik domestik dan politik internasional hanyalah dua manifestasi yang berbeda dari dua fenomena yang sama yaitu untuk tujuan perebutan kekuasaan. Semua politik mengungkapkan tiga pola dasar yaitu, kebijakan politik berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, meningkatkan kekuasaan, atau menunjukan kekuasaan. Politik internasional suatu negara memiliki tujuan akhir yaitu untuk menunjukkan kekuatan yang dimiliki, baik untuk mempertahankan atau meningkatkanya, juga untuk mengejar kebijakan prestise.

Konsep “status quo” berasal dari istilah diplomatic yang mengacu pada kondisi/keberadaan dalam perjanjian damai yang mana mengatur mengenai evakuasi wilayah oleh pasukan musuh dan juga pemulihan kedaulatan sebelum terjadinya perang. Kebijakan status quo bertujuan untuk memelihara distribusi kekuasaan yang ada pada saat tertentu dalam waktu sebelumya.

### **2.2.3 Great Power Rivalries**

Kajian mengenai Great Power Rivalries berfokus pada analisa teori yang dilakukan oleh Zachary Paikin, bahwa *International Society*, hari ini dapat terkonstitusi dengan baik melalui model tatanan liberal internasional yang kini menemui titik krisis dan kegagalannya. (Paikin, 2020) alasan ini bertuju pada kebangkitan China.

Persaingan kekeuatan besar tampaknya telah kembali. Sering diasumsikan bahwa perkembangan-perkembangan ini akan memeiliki konsekuensi penting bagi kelenggangan apa yang dimaksud dengan ‘tatanan internasional liberal’. Keamanan yang intens persingan dan kecenderungan untuk perang yang disebabkan oleh persaingan kekuatan seperti China dan Amerika. Pola persaingan negara dalam melakukan kebijakan luar negeri untuk tercapainya kepentingan negara tersebut. Hubungan AS-China merupakan persaingan secara langsung, karena dominasi AS di pasifik yang membatasi ruang gerak China.

### **2.2.4 Regional Security**

Setelah proses dekolonisasi dimulai banyak terjadi perubahan pada pola-pola keamanan pada politik internasional. Pada pendeekatan ini, Buzzan dan Wever mendefinisikan teori Regional Security Complex (RCST) sebagai:

*“a set of units whose major processes of securitization, desecuritisation, or both are so interlinkes that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from another.”* (Sonta A. , 2003)

RSCT didefinisikan oleh Buzan dan Waver merupakan suatu teori yang menekankan fokusnya pada signifikasi unsur kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional, dengan melalui pembentukan Regional Security. Kawasan merupakan sub sitem yang tidak terpisahkan dengan kedekatan geografis satu dengan yang lainnya. Kedekatan suatu negara dapat dilihat melalui dua hal yaitu: Amity, yaitu hubungan yang diciptakan atas dasar persabatan. Dan Emity, ialah hubungan suatu negara yang didasari oleh rasa saling curiga dan ketakutan.

Perubahan dari state menjadi unit menyebutkan bahwa aktor yang berperan dalam sekuritas dan desekuritas dapat berasal dari aktor non-negara. ZOPFAN & SEANFWZ merupakan bukti mekanisme Asia Tenggara dalam menghadapi kontesasi kekuasaan major powers. Dalam perjanjian ini peenyelesaian sengketa wajib dilakukan dengan cara damai dan tidak menggunakan kekerasan.

### **2.2.5 Influence**

Power merupakan gambaran kapasitas suatau negara untuk mencapai suatu tujuan, Power merupakan sarana sekaligus menajdi tujuan yang bersifat relative dan tidak pernah tetap dalam keadaan yang absolut. Karena sifatnya yang tidak absolut (dinamis) maka power dapat berubah dan bervariasi menurut:

1. waktu ke waktu
2. tujuan (*goal*)
3. *country*
4. kompetisi yang sedang berlangsung

Power sering juga diartikan sebagai force, authority, influence. Power sebagai daya force diartikan sebagai kekuatan dalam arti militer yang berhubungan dengan actual power. Power sebagai daya authority memiliki arti dimana kekuasaan yang mengacu kepada segi legitimasi atas kekuasaan. Dan power di sebagai daya influence mempunyai sifat yang persuasive dan sedikit menggunakan ancaman demi mencapai tujuan.

Dalam konsep theoretical framework of English school, Pauk Keal dalam buku (one of Bull”s students), dia menyarankan untuk melihat lingkup pengaruh sebagai masyarakat internasional yang menyeimbangkan ‘solidarisme’ dan ‘prularisme’. Dalam konsep tentang lingkup pengaruh intinya adalah ketegangan antara intervensi (hirarki) dan kedaulatan (kesetaraan). Hast membagi mengenai konsep inti terkait untuk memahami arti lingkup pengaruh yaitu ‘hegemoni’, ‘kekuatan besar’, ‘kedaulatan’, ‘intervensi’, ‘legitimasi’ dan ‘perlindungan. (Hast, 2014)

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut: “Jika kerjasama aukus untuk upaya *struggle for power*)memberikan respon seperti penolakan dan penerimaan,”

* 1. **Verifikasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel bebas: Jika kerjasama aukus untuk upaya *struggle for power* Australia | Adanya pakta Kerjasama AUKUS  | Australia, US, dan UK telah mengumunkan bahwa mereka telah menandatangani suatu aliansi kerjasama keamanan trilateral bernama “AUKUS”Sumber 1 : <https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus>Sumber 2 : <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/09/15/remarks-by-president-biden-prime-minister-morrison-of-australia-and-prime-minister-johnson-of-the-united-kingdom-announcing-the-creation-of-aukus/>Sumber 3 : <https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership> |
| Variabel Terikat: maka negara-negara asia tenggara memberikan respon seperti penolakandan penerimaan. | 1. Adanya negara di Asia Tenggara yang memberikan respon pro terhadap perjanjian AUKUS, yaitu negara Philippines, Singapore, dan Vietnam
2. Adanya negara di kawasan Asia Tenggara yang memberikan respon kontra teerhadap perjanjian AUKUS, yaitu: Malaysia dan Indonesia.
3. Adanya negara di kawasan Asia Tenggara yang memberikan respon netral terhadap perjanjian AUKUS, yaitu: Thailand
 | Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memberikan respon pro terhadap perjanjian kapal selam AUKUS yaitu : Singapura, Filippina, dan VietnamSumber : <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/>Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211122150656-106-724474/deret-negara-asean-yang-dukung-vs-tolak-aukus-seperti-china>Negara-negara yang memberikan respon kontra terhadap perjanjian kapal selam AUKUS, yaitu : Indonesia dan Malaysia  Sumber : <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/>Sumber : <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9335/CBP-9335.pdf>Negara-negara yang memberikan respon netral terhadap perjanjian kapal selam AUKUS, yaitu: ThailandSumber : <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/> |

**2.5 Skema dan Alur Penelitian**

Inggris dan Amerika

Australia

Negara-negara Asia Tenggara merespon

NPT

AUKUS

PRO

Netral

Kontra